

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG PEMANGGILAN DAN PERSIDANGAN SECARA
ELEKTRONIK DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Muhammad Amin Rifai¹, Iwan Riswandie², Oktaviana Hardayanti Adismana³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810792

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1113098102

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1112109301

E-mail: m.amin.rifai@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Agung mengeluarkan inovasi menggunakan teknologi informasi untuk menuju ke arah pengadilan elektronik. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Banjarmasin menerima untuk pertama kalinya melalui pengadilan elektronik pada tanggal 30 Januari 2023. Penerapan pengadilan elektronik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan untuk dapat menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Pada faktanya, inovasi pengadilan elektronik masih belum efektif. Terdapat hambatan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti pencari keadilan tidak bisa menggunakan internet dan tidak adanya jangkauan internet di wilayah tempat tinggal pencari keadilan.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas pemanggilan secara elektronik di PHI Banjarmasin menurut Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan bagaimana hambatan persidangan secara elektronik di PHI Banjarmasin menurut Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang berperkara melalui pengadilan elektronik, seluruh hakim, dan panitera dari PHI Banjarmasin. Teknik *sampling* yang digunakan adalah sensus dan *sampling purposive*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data diorganisasikan dalam kategori dan membuat kesimpulan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode penelitian kualitatif secara induktif.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pemanggilan secara elektronik di PHI Banjarmasin belum efektif. Hal ini dikarenakan hanya terdapat 4 faktor dari 5 faktor efektivitas hukum yang sudah optimal yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pada faktor lainnya yaitu faktor penegak hukum, masih belum optimal.

Persidangan secara elektronik di PHI Banjarmasin belum efektif. Hal ini dikarenakan hanya terdapat 2 faktor dari 5 faktor efektivitas hukum yang sudah optimal yaitu faktor hukumnya sendiri dan faktor kebudayaan. Pada faktor lainnya yaitu faktor penegak hukum, faktor fasilitas, dan faktor masyarakat belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, (2023), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana.
- Amran Suadi, (2020), *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sutiyoso, (2015), *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: UII Press.
- Firdaus, (2021), *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*, Cetakan ke-1, Riau: DOTPLUS Publisher.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, (2022), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana.
- Haris Herdiansyah, (2019), *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups: sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Cetakan ke-3, Depok: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung, (2019), *Buku Panduan E-Court: The Electronic Justice System*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Muhammad Sadi dan Sobandi, (2020), *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana.
- Novyta Uktolseja dan Yosia Hetharie, (2022), *Modul Praktik Acara Perdata*, Cetakan ke-1, Klaten: Lakeisha.
- Rachmad Baro, (2016), *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Deepublish.
- Soerjono Soekanto, (2022), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-18, Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2022), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-4, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, (2013), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan ke-15, Jakarta: Rineka Cipta.

Syahrul Machmud, (2014), *Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (*E-court*) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, *Jurnal Hukum Legalita*, 2019, hlm. 23. dapat diakses online pada <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/28/13>., tanggal 7 April 2023.

Ieke Wulan Ayu, Zulkarnaen, dan Syarif Fitriyanto, “Budaya Digital dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 2022, hlm. 20-21. dapat diakses online pada <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jpml/article/view/922/906>, tanggal 7 Juli 2023.

Irmayani Nasution, Zuhendry, dan Raina Rosanti, “Pengaruh Bekerja dari Rumah (*Work From Home*) Terhadap Kinerja Karyawan BPKP”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting*, 2020, hlm. 11. dapat diakses online pada <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/budgeting/article/view/211/20>., tanggal 7 April 2023.

Mira Ade Widyanti, “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah”, *Journal of Islamic Business Law*, 2021, hlm. 75. dapat diakses online pada <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/769/602>., tanggal 7 April 2023.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, dan Alfyan Mardiansyah, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021, hlm. 223. dapat diakses online pada <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/768/pdf>., tanggal 7 April 2023.

Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi *E-court* untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia”, *Jurnal Yustitia*, 2019, hlm. 2. dapat diakses online pada <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275/220>., tanggal 7 April 2023.

Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2018, hlm. 2. dapat diakses online pada <https://www.ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>., tanggal 21 Juni 2023.

Skripsi

Fahmi Putra Hidayat, (2020), “Efektivitas Penerapan *E-court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

Wahyu Aida Nahar, (2021), “Efektivitas *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan

Negeri Purwokerto, Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Thalia Ahadiyah, (2019), “*Proses Persidangan dalam Tindak Pidana Concursus*” (*Studi Kasus Putusan No. 649/Pid.B/2015/PN.MLG*). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Kamus/Ensiklopedia

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, (2018), *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenadamedia Grup.

Wawancara

Eko Setiawan. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 6 Juni 2023.

Moh. Muniri. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 7 Mei 2023.

R.M. Bounded Krisnha Dewa. Kuasa Hukum Penggugat. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 20 Juni 2023.

Rahmadani. Perwakilan Tergugat. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 20 Juni 2023.

Rini Budi Utami. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 7 Mei 2023.

Ronny Kosasih. Kuasa Hukum Penggugat. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 17 Mei 2023.

Suyanti. Panitera Muda Khusus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 7 Mei 2023.

Syamsu Mesabara. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 7 Mei 2023.

Tugimin. Kuasa Hukum Penggugat. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 10 Mei 2023.

Website

Hukum Online, “Pelaksanaan *E-Court* dalam Pengadilan dan Manfaatnya” dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/%20ecourt-pengadilan-agama-lt5e2577a68ea0d/>, tanggal 8 Juli 2023.

Katadata, “67% Penduduk Indonesia Punya *Handphone* pada 2022, Ini Sebarannya” dapat diakses online pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/08/67-penduduk-indonesia-punya-handphone-pada-2022-ini-sebarannya>, tanggal 21 Juni 2023.

Katadata, “Pengguna WhatsApp Terus Bertambah, Ini Jumlahnya Sekarang” dapat diakses online pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/07/pengguna-whatsapp-terus-bertambah-ini-jumlahnya-sekarang>., tanggal 21 Juni 2023.

Kementerian Keuangan, “Implementasi *Work From Home* sebagai Upaya ‘*Social Distancing*’: *A Blessing in Disguise?*” dapat diakses online pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13010/Implementasi-Work-From-Home-Sebagai-Upaya-Social-Distancing-A-Blessing-in-Disguise.html>., tanggal 12 Februari 2023.

Komisi Kejaksaan, “Sidang *E-Court* Langkah Positif untuk Masa Depan Peradilan” dapat diakses online pada <https://komisi-kejaksaan.go.id/sidang-e-court-langkah-positif-untuk-masa-depan-peradilan/>., tanggal 12 Februari 2023.

Mahkamah Agung, “Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi *E-Court*” dapat diakses online pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3087/%20ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court>., tanggal 7 April 2023.

Mahkamah Agung, “Ketua PTA Medan Himbau Penggunaan *E-Court* dalam Pendaftaran Perkara di PA” dapat diakses online pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ketua-pta-medan-himbau-penggunaan-e-court-dalam-pendaftaran-perkara-di-pa>., tanggal 7 April 2023.

Mahkamah Agung, “Respon MA dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” dapat diakses online pada <https://badilag.mahkamahagung.go.id/suara-pembaca-badilag/suara-pembaca/respon-ma-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19-ditulis-oleh-ubed-bagus-razali-s-h-i>., tanggal 7 April 2023.

Pengadilan Negeri Banjarmasin, “Panduan *E-Court*” dapat diakses online pada <https://pn-banjarmasin.go.id/index.php/layanan-publik-menu/informasi-perkara/panduan-aplikasi/e-court>., tanggal 12 Februari 2023.

Pengadilan Negeri Banjarmasin, “Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A” dapat diakses online pada <https://pn-banjarmasin.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-hakim-pegawai/profil-hakim>., tanggal 7 Mei 2023.

Pengadilan Negeri Banjarmasin, “Daftar Perkara Pengadilan Hubungan Industrial” dapat diakses online pada https://sipp.pn-banjarmasin.go.id/list_perkara/type/TFQ0OWduNDJyeWdnWlg5Z2NmMlFzM3g3amwzN2ppMWNnSjBoZkJtbnhOeW81aDJrUIZqa2lTQ01PVVU0ZCtiTjgwM044QjNXblU0bmZsTnVINXRQWF E9PQ==., tanggal 4 Juli 2023.

Wikipedia, “Mahkamah Agung Republik Indonesia” dapat diakses online pada https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia., tanggal 7 April 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.